

## **TUGAS AKHIR**

**Penyelesaian Sengketa Pembebasan Lahan Pertambangan PT. Kaltim Prima  
Coal Terhadap Lahan Yang Diakui Masyarakat Sekitar Kabupaten Kutai  
Timur di Kalimantan Timur  
(Studi Kasus di Perusahaan PT. Kaltim Prima Coal)**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:  
**PUTRI ANSARI**  
**NIM: 202010110311142**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBEBASAN LAHAN PERTAMBANGAN  
PT. KALTIM PRIMA COAL TERHADAP LAHAN YANG DIAKUI  
MASYARAKAT SEKITAR KABUPATEN KUTAI TIMUR DI  
KALIMANTAN TIMUR**

Diajukan Oleh:

**PUTRI ANSARI**

**202010110311142**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 22 Januari 2024

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Fikri Wiryani, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Isdian Anggraeny, SH., MKn**

Dekan,  
  
  
**Prof. Dr. M. H. M. Hum**

Ketua Program Studi,  
  
**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**PUTRIANSARI**

**202010110311142**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 22 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Komariah SH.,M.Si.,M.Hum

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are arranged vertically, corresponding to the list of exam board members. The first signature is for the Chairman, the second for the Secretary, the third for the Examiner I, and the fourth for the Examiner II.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : PUTRI ANSARI  
NIM : 202010110311142  
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBEBASAN LAHAN PERTAMBANGAN  
PT. KALTIM PRIMA COAL TERHADAP LAHAN YANG DIAKUI  
MASYARAKAT SEKITAR KABUPATEN KUTAI TIMUR DI  
KALIMANTAN TIMUR

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 01 Februari 2024  
  
Putri Ansari

**Ungkapan Pribadi :**

*“Beranilah mengambil risiko  
bermimpilah dengan setinggi-tingginya  
dan berharaplah seakan-akan semuanya  
akan menjadi kenyataan.”*



**Motto :**

*“Hidup adalah awal dari  
petualangan,  
maka beranilah dalam  
melakukan petualangan  
tersebut.”*

## ABSTRAKSI

**Nama : Putri Ansari**  
**NIM : 202010110311142**  
**Judul : Penyelesaian Sengketa Pembebasan Lahan Pertambangan PT. Kaltim Prima Coal Terhadap Lahan Yang Diakui Masyarakat Sekitar Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur (Studi Kasus di Perusahaan PT. Kaltim Prima Coal)**  
**Pembimbing : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum**  
**2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn**

Pembebasan Lahan merupakan upaya untuk melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi yang sesuai, dan telah berdasarkan kepada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga tidak merugikan dan memberatkan pihak lainnya. Meskipun demikian, skema ini terkadang masih dianggap kurang sesuai karena masyarakat sekitar beranggapan bahwa skema tersebut hanya melihat tanah milik masyarakat sebagai aset ekonomi yang bisa dengan mudah di *konversi* ke dalam bentuk uang. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yuridis empiris, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan terjadinya persengketaan antara PT. KPC dengan masyarakat sekitar serta upaya hukum seperti apa yang dilakukan PT. KPC dalam menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan pertambangan terhadap lahan yang diakui masyarakat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembebasan lahan pertambangan memang kerap menimbulkan berbagai macam permasalahan hukum serta ketidaksepahaman dengan masyarakat sekitar terutama terkait dengan nilai ganti ruginya, oleh karena itu diperlukan pelaksanaan musyawarah mufakat dengan jalan negoisasi guna mendapatkan kesepakatan dengan tujuan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak serta diperlukan pertanggungjawaban oleh PT. KPC dalam melakukan proses pembebasan dengan tetap berdasarkan kepada syarat-syarat pembebasan lahan yaitu berdasarkan kebijakan pemerintah dalam kelola tata ruang yang wajib bernilai keadilan bagi para masyarakat, sehingga diperlukan perencanaan, peruntukkan dan penggunaan hak atas tanah guna menjamin tanah dapat berfungsi sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun negara demi terealisasinya hak atas tanah. Selain itu, hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa saat melakukan penyelesaian masalah, PT. KPC terlebih dahulu akan mengedepankan jalur penyelesaian secara non-litigasi dibanding litigasi.

**Kata Kunci: Sengketa, Pembebasan Lahan, Pertambangan**

## ABSTRACT

**Nama** : Putri Ansari  
**NIM** : 202010110311142  
**Judul** : *Settlement of PT Mining Land Acquisition Disputes. Kaltim Prima Coal on Land Recognized by the Community Around East Kutai Regency in East Kalimantan (Case Study at the company PT. Kaltim Prima Coal)*  
**Pembimbing** : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum  
2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

*Land Acquisition is an effort to release the legal relationship that previously existed between land rights holders by providing appropriate compensation, and is based on conditions that must be fulfilled so that it does not harm or burden other parties. However, this scheme is sometimes still considered inappropriate because local people think that the scheme only views community land as an economic asset that can be easily converted into money. Therefore, by using qualitative research methods with an empirical juridical research type, this research aims to determine the reasons for disputes between PT. KPC with the surrounding community as well as legal efforts such as what PT. KPC in resolving mining land acquisition issues on land recognized by the community. The results of this research state that mining land acquisition often gives rise to various kinds of legal problems and disagreements with the surrounding community, especially regarding the value of compensation, therefore it is necessary to carry out consensus deliberation through negotiation in order to obtain an agreement with the aim of providing benefits for both parties and is necessary. accountability by PT. KPC in carrying out the acquisition process is still based on the terms of land acquisition, namely based on government policy in spatial management which must have a value of justice for the community, so that planning, allocation and use of land rights is needed to ensure that the land can function in accordance with the established plan. by the government or state for the realization of land rights. Apart from that, the results of this research also state that when solving problems, PT. KPC will first prioritize non-litigation resolution rather than litigation.*

**Kata Kunci:** *Dispute, Land Acquisition, Mining*



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga tugas akhir yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pembebasan Lahan Pertambangan PT. Kaltim Prima Coal Terhadap Lahan Yang Diakui Masyarakat Sekitar Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur (Studi Kasus di Perusahaan PT. Kaltim Prima Coal)” dapat diselesaikan penulis dengan tepat waktu. Penyusunan tugas akhir ini dilakukan sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat-Nya. Dengan telah selesainya tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang turut serta dalam membantu penyelesaian tugas akhir ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berbagai macam bimbingan serta bantuan yang telah diberikan dalam pembuatan tugas akhir ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang juga telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang senantiasa membimbing penulis saat perkuliahan.
4. Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing pertama yang senantiasa memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan kepada penulis selama menempuh program Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, sehingga dapat segera menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing kedua yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.
6. Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada mahasiswa mahasiswinya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswi, sehingga dapat memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.



8. Bapak dan Ibu Instruktur Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. PT. Kaltim Prima Coal
10. Departemen Land Management
11. Bapak Wirabuana Sirajang dan Bapak Amalikus Mahda selaku pembimbing penulis saat melaksanakan penelitian tugas akhir di PT. Kaltim Prima Coal, yang senantiasa memberikan bimbingan dan informasi terkait pembahasan pada tugas akhir penulis.
12. Terima kasih kepada Ibu, Ayah, Kakak, Adik, serta anggota keluarga lainnya yang selalu memberikan doa dan mendukung penulis untuk terus bersemangat dalam mencapai gelar sarjana strata-1
13. Terimakasih kepada Muhammad Yanuar Ragil Arief selaku teman dekat penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta sikap-sikap baik yang membuat penulis menjadi bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis, Fatimah, Ivena, Zahra, Tiara, Aisyah, dan Vivi, yang telah menjadi teman penulis selama perkuliahan. Terima kasih karena selalu memberikan dukungan, bantuan, dan selalu menghibur penulis saat sedang berada di masa sulit.
15. Terima kasih juga kepada diri sendiri yang sudah mampu bertahan untuk terus berjuang dan menyelesaikan perkuliahan ini hingga selesai.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa pada tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT. memberikan pahala dan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. aamiin.

Wassalamualaikum wr. wb

Malang, 12 Januari 2024



Putri Ansari

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL/BAGAN/GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Kegunaan Penelitian .....	15
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa .....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pertanahan .....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Lahan .....	37
E. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Lahan Pertambangan .....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
B. Posisi Kasus Antara PT. Kaltim Prima Coal Dengan Masyarakat Sekitar Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur.....	52
C. Penyebab Terjadinya Persengketaan Antara PT. Kaltim Prima Coal Dengan Masyarakat Sekitar Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur .....	56
D. Upaya Hukum Yang Dilakukan PT. Kaltim Prima Coal Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pembebasan Lahan Pertambangan Terhadap Lahan Yang Diakui Masyarakat .....	71
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
DAFTAR PUSTAKA .....	92
INDEKS .....	98
LAMPIRAN .....	98

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2. Populasi Sengketa Pembebasan Lahan PT. KPC Pada Kurun Waktu Januari 2023 – Desember 2023 .....	62
Tabel 3. Sampel Pembebasan Lahan Oleh PT. KPC Pada Bulan Agustus 2023 – Oktober 2023 .....	63
Tabel 4. Data Hasil Wawancara Terhadap Masyarakat Mengenai Pembebasan Lahan Yang Dilakukan .....	64
Tabel 5. Prosedur Operasi Standar Penanganan Sengketa Pertanahan .....	74



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Indeks .....	98
Lampiran 2. Surat Tugas Penulisan Akhir .....	99
Lampiran 3. Kartu Kendali Bimbingan .....	101
Lampiran 4. Surat Izin Observasi .....	103
Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian dari lokasi .....	104
Lampiran 6. Foto .....	106



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arif, I. I. 2014. *Batubara Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 19
- Limbong Bernhard. 2015. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta. Margaretha Pustaka. Hal. 127
- Mudakir Iskandar Syah. 2018. *Pembebasan Tanah & Reklamasi Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Jakarta. Jala Permata Aksara. Hal. 96
- Primadoni, A. 2021. *Sengketa Berkepanjangan dalam Pandangan Antropologi Hukum*.
- Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hal. 144.
- Sugianto, Leliya. 2017. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sebuah Analisis Dalam Persepektif Hukum Dan Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat*. Yogyakarta. Deepublish. Hal. 55.
- Wibowo, A. dan Rahmadi, D. 2022. *Best Score Psikotes Kerja*. Genta Smart Publisher.
- Winarta, F. H. 2022. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.

### Jurnal

- Alan, M. (et.al.). 2021. *Evaluasi Kinerja Alat Mekanis Pada Kegiatan Pengupasan Tanah Penutup Di PT. Selama Prima Coal Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun*. Jurnal Mine Magazine. 2(1).
- Amaliyah, A. (et.al.). 2021. *Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah*. Hermeneutika. Jurnal Ilmu Hukum. 5(1).
- Amarini, I. 2017. *Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan*. Kosmik Hukum, 16(2).
- Anatami, D. 2017. *Tanggung jawab siapa, bila terjadi sertifikat ganda atas sebidang tanah*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. 12(1). Hal. 1-17.
- Andriany, V. 2019. *Penilaian Ganti Rugi Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembebasan Lahan Untuk Tapak Tower Pln)*. Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness. 2(2).
- Arifin, B. W. (et.al.). 2023. *Kewenangan Bertindak Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibeli Dari Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Masih Terikat Harta Bawaan di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jurnal Multidisiplin Indonesia. 2(9). Hal. 2835-2858.
- Asri, S. dan Samin, S. 2020. *Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah di Kecamatan Kajang*. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah. 1(3). Hal. 561-570.

- Fadillah, F. A. dan Putri, S. A. 2021. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)*. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan. 2(6). Hal. 744-756.
- Fernandez, Y. P. D. (et.al.). 2023. *Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pembebasan Lahan Bendungan Manikin di Desa Baumata Timur Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6).
- Hakim, T. R. (et.al.). 2023. *Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Di Kabupaten Kampar*. UNES Law Review. 5(3). Hal. 863-877.
- Hartana, H. 2017. *Proses Membentuk Perusahaan Baru Dalam Pelaksanaan Ekspansi Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan Batubara*. Perspektif. 22(2). Hal. 142-165.
- Hidayat, R. dan Hayati, H. 2019. *Pengaruh Pelaksanaan Sop Perawat Pelaksana Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Di Rawat Inap RSUD Bangkinang*. Jurnal Ners, 3(2). Hal. 84-96.
- Ihyamuis, M. (et.al.). 2022. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan: Studi Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi'e Dongi dan PT Vale Indonesia Tbk*. Amanna Gappa. Hal. 1-14.
- Kasenda, D. G. 2017. *Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Morality: Jurnal Ilmu Hukum. 2(2). Hal. 122-141.
- Lubis, A. S. 2019. *Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak*. Doktrina: Journal Of Law. 2(1). Hal 1-12.
- Mandey, D. 2022. *Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Masyarakat Adat Minahasa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Gugatan No. 117/Pdt. G/2012/Pn. Btg)*. Lex Administratum. 10(6).
- Markiano, R. dan Perwirawati, E. 2019. *Persepsi Mahasiswa/I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Terhadap Budaya K-Pop Di Media*. Jurnal Social Opinion: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi. 4(1). Hal. 30-42.
- Marlin, D. (et.al.). 2019. *Lingkungan Pengendapan dan Peringkat Batubara Berdasarkan Analisis Petrografi dan Kimia, Formasi Batu Ayau, Cekungan Kutai*. Geoscience Journal. 3(4). Hal. 296-302.
- Marsella, M. 2015. *Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. 2(2). Hal. 101-107.
- Nadzir, M. 2017. *Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah*. Journal de Facto, 4(1), 49-70.
- Nainggolan, N. H. 2016. *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna USAha PT. Emha dengan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara*. Jurnal Mercatoria. 9(1). Hal. 19-34.
- Nathania, B. P. 2022. *Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Adanya Sertifikat Tanah Ganda (Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 36/G/2019/PTUN. SRG)*. LEX ADMINISTRATUM, 10(2).

- Prasetyawan, B. 2023. *Pelaksanaan Kewajiban Divestasi Saham Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. UNES Law Review. 5(4). Hal. 3724-3735.
- Ramadhani, S. (et.al.). 2022. *Strategi Lobi dan Negosiasi Dalam Proses Komunikasi Politik*. Jurnal Edukasi Nonformal. 3(1). Hal. 89-95.
- Rawar, E. dan Waas, R. F. 2018. *Analisis Sosio-Yuridis Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Merauke*. Jurnal Restorative Justice. 2(2). Hal. 82-100.
- Retnaningsih, H. 2015. *Permasalahan corporate social responsibility (csr) dalam rangka pemberdayaan masyarakat*. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial. 6(2). Hal. 177-188.
- Santoso, U. 2016. *Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Perspektif. 21(3). Hal. 188-198.
- Senjaya, M. 2023. *Penyelesaian Sengketa Pematokan Tanah Melalui Mediasi di Kabupaten Bandung Barat*. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat. 4(3). Hal. 5468-5477.
- Silalahi, A. O. P. (et.al.). 2017. *Analisis Hukum Terkait Konsultasi Publik dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan bagi Kepentingan Umum*. Pandecta Research law Journal. 12(1). Hal. 88-97.
- Soesanto, E. (et.al.). 2023. *Sistem Kebijakan Objek Vital Nasional, Pengamanan File dan Pengamanan Cyber Terhadap Bank Mandiri*. Cross-border. 6(1). Hal. 680-686.
- Swela, A. (et.al.). 2017. *Analisis dampak pembebasan tanah dan nilai ganti rugi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas dan Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus*. Journal of Politic and Government Studies. 6(2). Hal. 41-50.
- Tampubolon. (et.al.). 2021. *Penggunaan Bahan Bakar Alternatif dalam Pengelolaan Tambang Batubara sebagai Sumber Energi untuk Mengurangi Dampak Terhadap Lingkungan*. Jurnal Ilmu Lingkungan. Volume 19 Nomor 1. hal. 89-97.
- Warman, K. dan Andora, H. 2014. *Pola Hubungan Hukum dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Sumatera Barat*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 26(3). Hal. 366-381.
- Wiguna, M. O. C. 2018. *Peluang penyelesaian sengketa perdata tentang tanah melalui alternative dispute resolution dengan asas-asas hukum perjanjian di dalamnya*. Jurnal Hukum & Pembangunan. 48(3). Hal. 506-520.
- Yusrizal, M. 2017. *Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum. 2(1). Hal. 113-138.
- Yusyanti, D. 2017. *Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. 16(3). Hal. 309-321.
- Zaini, A. 2017. *Pengaruh kekayaan sumberdaya alam batubara terhadap ketimpangan*



*pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Borneo Administrator. 13(2). Hal. 111-130.*

### **Artikel Ilmiah**

Mahreni, M. dan Puspitasari, M, 2019, *Pencucian Batu Bara*, 1,1(1) LPPM UPN Veteran Yogyakarta, Yogyakarta.

Wulandari, H. 2018. *Analisis Penambangan Batu Bara PT. Kaltim Prima Coal Kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur*. publikasi pada tanggal, 22.

### **Penelitian/Skripsi/Thesis/Disertasi**

Afifah, R. 2019. "*Harmonisasi Prinsip Hukum Tanggung Jawab Sosial-Lingkungan Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*" Bachelor's thesis.

Aristiyanti, D. P. 2020. "*Pengaruh Produksi, Harga Batu Bara Acuan, Harga Batu Bara Australia, dan Kurs Terhadap Ekspor Batu Bara di Indonesia*". Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin, Jakarta.

Bagaskara, K. 2022. "*Upaya Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Kewajiban Reklamasi Pasca-Tambang Oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus*". Hasil Penelitian Fundamental DIKTI, Lampung.

Cennu, H. A. 2022. "*Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah*". Doctoral dissertation. Universitas Bosowa.

Jaya, R. Z. 2022. "*Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Atas Pembebasan Lahan Untuk Sutt 150Kv*". Doctoral dissertation. Universitas Bhayangkara Surabaya.

Rezha, A. 2023. "*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Minerba*". Doctoral dissertation, Universitas Mataram.

Rohmat, A. 2020. "*Tanggung Jawab PT Kereta Cepat Indonesia China Terhadap Lahan Diluar Trase Yang Dirugikan Menjadi Lahan Yang Tidak Produktif Oleh Adanya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung*". Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan..

Rosyadah, S. L. 2020. "*Konsinyasi Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Rel Kereta Api Bandara Adi Soemarmo-Stasiun Solo Balapan)*". Doctoral dissertation. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Satyo, B. K. 2023. "*Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Yang Telah Didirikan Bangunan Karena Alat Bukti Lemah (Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Salatiga)*" Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

### **Internet**

Badan Pertanahan Nasional, <http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2021.

Munir, Syahrul. *Banyak Sengketa Tanah, Menteri Agraria Usulkan Peradilan Pertanahan*, <https://regional.kompas.com/read/2017/10/24/19100031/banyak-sengketa-tanah-menteri-agraria-usulkan-peradilan-pertanahan>, edisi 24 Oktober 2017.

### **Hasil Wawancara dan Observasi**

Hasil Wawancara dengan bapak Amalikud Mahda. Karyawan Swasta PT. KPC. 10 Agustus 2023.

Hasil Wawancara dengan bapak Jovi. Masyarakat Desa Singa Gembara. 6 September 2023.

Hasil Wawancara dengan bapak Jumarang. Ketua RT 29 Desa Singa Gembara. 6 September 2023.

Hasil Wawancara dengan bapak Reno. Karyawan Swasta PT. KPC. 2 Oktober 2023.

Hasil Wawancara dengan bapak Supri. Masyarakat Desa Singa Gembara. 16 Agustus 2023.

Hasil Wawancara dengan bapak Wirabuana Sirajang. Karyawan Swasta PT. KPC. 18 Agustus 2023.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan

Keputusan Bupati tentang Pedoman Tarif Nilai Ganti Rugi Atas Tanah dan Isi di Atasnya (tanam tumbuh, bangunan dll) Untuk Keperluan Eksplorasi dan Eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta Lainnya

## 2. Bukti Bebas Plagiasi

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH  
 Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :


Nama : Putri Ansari  
 Nim : 202010110311192

Dengan Judul Skripsi :  
 Penyelesaian sengketa pembebasan lahan pertambangan PT.  
 Kaltim Prima Coal Terhadap Lahan yang diakui Masyarakat  
 sekitar kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1/24  
 12  


Kaltim, 11 Januari 2024  
  
 Cholidah, SH., MH